KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. +62 21 5730301
Fax. +62 21 5733437

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA

2020

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA 2020

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2021

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Tlp: +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437
Email: evaluatorksdae@gmail.com; setditjenksdae@menlhk.go.id

“Pusat Suaka Satwa Elang Jawa (PSSEJ)” dibangun di TN Gunung Halimun Salak dengan menggunakan sumber dana SBSN. Tahun 2020 BTN Gunung Halimun Salak meraih penghargaan sebagai Pengelola SBSN terbaik tingkat Kementerian LHK dari Kementerian Keuangan RI.

Dokumentasi:
BTN Gunung Halimun Salak

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja yang diperjanjikan dalam periode tahun 2020 yaitu nilai SAKIP sebesar 78 poin, opini WTP atas laporan keuangan, dan level maturitas SPIP pada level 3. Dengan kinerja organisasi yang produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan ditengah masa pandemi Covid 19 ini, ketiga indikator tersebut dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pertama, evaluasi atas penerapan SAKIP pada Ditjen KSDAE yang dilakukan oleh APIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Ditjen KSDAE memperoleh nilai sebesar 79,37 dengan kategori BB (sangat baik). Kedua, Predikat WTP diperoleh atas dukungan seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE dalam menjaga ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara, keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Ditjen KSDAE dan tidak lanjut penyelesaian atas temuan-temuan. Ketiga, maturitas SPIP 2020 untuk Ditjen KSDAE adalah 3,358 berada di tingkat 'Terdefinisi' ,artinya Ditjen KSDAE telah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten.

Kami menyadari bahwa target-target kinerja telah tercapai, namun masih ditemui kekurangan. Kedepan, seiring dengan penetapan target kinerja yang terus meningkat di setiap tahunnya dan tantangan dalam situasi pandemi covid 19, kami akan terus berupaya untuk memperbaiki kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE dan semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE. Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang sangat kami harapkan. Semoga melalui kegiatan dukungan manajemen dapat mendukung terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen KSDAE dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Januari 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ir. Tandyo Tjahjana, M.Si.
NIP. 19620412 199203 1 002

Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE 2020

Dokumentasi:
Datin Setditjen KSDAE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53Tahun 2014 tentang PetunjukTeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan pengelolaan anggaran tahunan dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Berdasarkan Renstra Sekretariat Ditjen KSDAE, program yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah program Dukungan Manajemen dengan tiga indikator capainnya. Ketiga indikator tersebut dicapai setiap tahun sesuai dengan rencana kerja yaitu (1) Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan; (3) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan capaian ketiga indikator, rata-rata capaian kinerja Sekretariat DItjen KSDAE tahun 2020 adalah sebesar 104,56%.

Capaian kinerja tahun 2020, Pertama SAKIP memperoleh nilai 79,37 (tercapai 101,76%) dari target 78. Hasil evaluasi SAKIP terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja, penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja yang memperoleh nilai 25,5 dari 30, Pengukuran kinerja memperoleh nilai 20,10 dari 25, Pelaporan kinerja memperoleh nilai 12,31 dari 15, Evaluasi kinerja memperoleh nilai 6,30 dari 10, dan Pencapaian kinerja memperoleh nilai 15,61 dari 20.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa kendala dalam implementasi SAKIP, antara lain: 1) Dokumen renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja, 2) Monitoring capaian renstra belum dilakukan secara periodik dan terdokumentasi, 3) Masih terdapat perbedaan target kinerja tahunan yang belum selaras dengan renstra, 4) Perjanjian kinerja masih sepenuhnya digunakan untuk penyusunan sasaran kinerja pegawai, 5) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum memadai, 6) Belum dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, 6) Masih terdapat perbedaan dalam menyajikan data kinerja. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan sistem SAKIP sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi, antara lain: 1) Melakukan evaluasi kesesuaian dalam penetapan target kinerja, 2) Melakukan monitoring pencapaian target kinerja secara periodik, 3) Melakukan reviu renstra dalam penyusunan target kinerja tahunan sampai dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai, 4) Melakukan pengukuran kinerja pegawai secara berjenjang, 5) Melakukan pengumpulan data kinerja secara periodik

Kedua, opini atas laporan keuangan telah mendapatkan 1 opini WTP (tercapai 100%). Predikat WTP ini diperoleh atas dukungan seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE dalam menjaga ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara. Keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Ditjen KSDAE disusun mulai dari satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa PenggunaAnggaran (UAKPA), melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) sampai pada kompilasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1). Menyelesaikan rekomendasi – rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya terus dilakukan oleh Ditjen KSDAE dalam rangka mendukung tindak lanjut yang ditargetkan oleh BPK RI.

Ketiga, maturitas SPIP mendapatkan level 3,358 (tercapai 111,93%) dari target IKK Level Maturitas SPIP pada PK Sekretariat DItjen KSDAE pada level 3. Penilaian maturitas SPIP dilakukan pada 5 unsur yang dijabarkan dalam 25 sub unsur. Perolehan nilai tersebut mengindikasikan penyelenggaraan SPIP di lingkup Ditjen KSDAE berada di tingkat 'Terdefinisi', artinya Ditjen KSDAE telah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten, namun belum sepenuhnya melakukan evaluasi efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan secara berkala dan pemantauan yang berkelanjutan serta terintegrasi dalam pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Untuk mencapai kinerja tersebut, Sekretariat Ditjen KSDAE merealisasikan anggaran sebesar Rp 73.356.148.696 (91,63%) dari Rp 80.056.000.000 pagu yang dianggarkan. Dengan capaian yang diperoleh melebihi 100% dan realisasi anggaran mencapai 91,63%, diperoleh efisiensi kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE senilai 0,87 yang dikategorikan sebagai kinerja yang cukup efisien

Kantong Habitat Satwa Meranti, Dangku

Dokumentasi :
Taufan Kharis

GLOSARIUM

APIP : Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BAP : Berita Acara Pemeriksaan
BKN : Badan Kepegawaian Negara
BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BMN : Barang Milik Negara
BPEE : Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA : Direktorat Jenderal Anggaran
Ditjen : Direktorat Jenderal
DUPAK : Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
GTM : Gugus Tugas Multipihak
HAPAK : Hasil Penilaian Angka Kredit
HKAN : Hari Konservasi Alam Nasional
ICT : Information and Communications Technology
IKK : Indikator Kinerja Kegiatan
IKP : Indikator Kinerja Program
IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IP : Inventarisasi dan Penilaian Kembali
KK : Kawasan Konservasi
KKH : Konservasi Keanekaragaman Hayati
K/L : Kementerian/ Lembaga
KPB : Kuasa Pengguna Barang
KPKNL : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
LHA : Laporan hasil Audit
LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
OM SPAN : Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
PAK : Penilaian Angka Kredit
PEH : Pengendali Ekosistem Hutan
PEN : Pemulihan Ekonomi Nasional
PIKA : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
PJLHK : Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
PK : Perjanjian Kinerja
PKS : Perjanjian Kerjasama
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PMPRB : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
RDP : Rapat Dengar Pendapat
RKA-KL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga
RKBMN : Rencana Kebutuhan BMN
RKP : Rencana Kerja Pemerintah
RPD : Rencana Penarikan Dana
SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
SAPK : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
SBSN : Surat Berharga Syariah Negara
SIDAK : Sistem Informasi Data Konservasi
SIMPEG : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
WBK : Wilayah bebas Korupsi
WBBM : Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
ZI : Zona Integritas
ZSL : Zoological Society of London

Perahu Nelayan

Lokasi:
TN Teluk Cenderawasih

Dokumentasi :
Ran Ogostira

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iv
Ringkasan Eksekutif vi
Glosarium ix
Daftar Isi xi

BAB I PENDAHULUAN 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

BAB IV PENUTUP 41

Lampiran 43

Whale Shark Center
TN Teluk Cenderawasih

Dokumentasi:
BBTN Teluk Cenderawasih

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai pelaksana Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab atas pelaksanaan program dukungan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal KSDAE lainnya. Capaian kegiatan tersebut didasarkan pada pengukuran kinerja melalui tiga indikator, diantaranya : (1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan; (3) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP).

Anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen KSDAE tahun 2020 adalah sebesar Rp 80.056.000.000,-. Alokasi anggaran tersebut ditargetkan dapat mencapai indikator kegiatan tahun 2020 diantaranya : (1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem sebesar 78,00 (Poin); (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan; (3) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) pada level 3.

JUMLAH PEGAWAI SETDITJEN KSDAE BERDASARKAN JABATAN

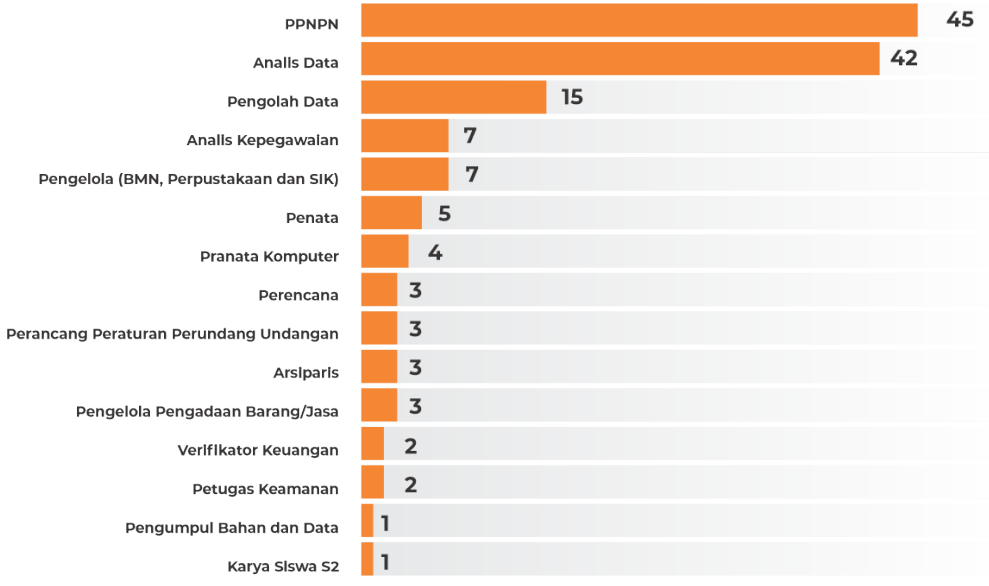

Paok schenider (*Hydrornis schneideri*)

Lokasi :
TN Kerinci Seblat

Dokumnetasi:
Mhd Zaid

ASET SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

Dalam melaksanakan tugasnya Setditjen KSDAE secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana. Aset atau Barang Milik Negara (BMN) intrakomptabel yang dikelola Setditjen KSDAE per 31 Desember 2020 mencapai Rp. 81.410.612.862,-, dengan rincian sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2020

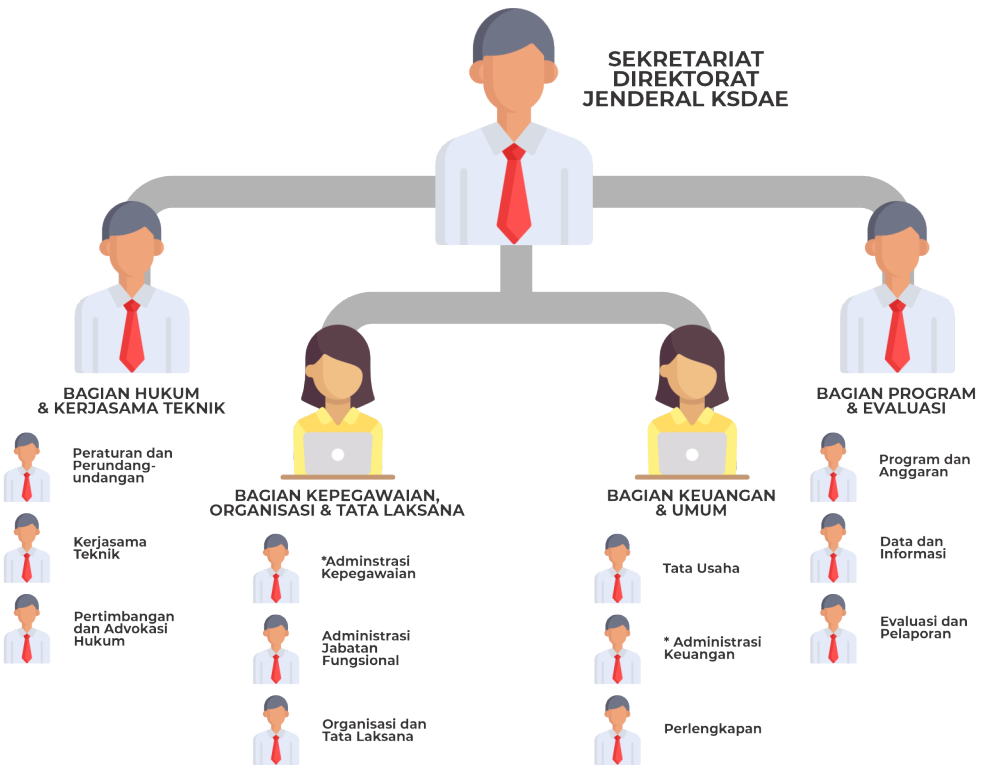

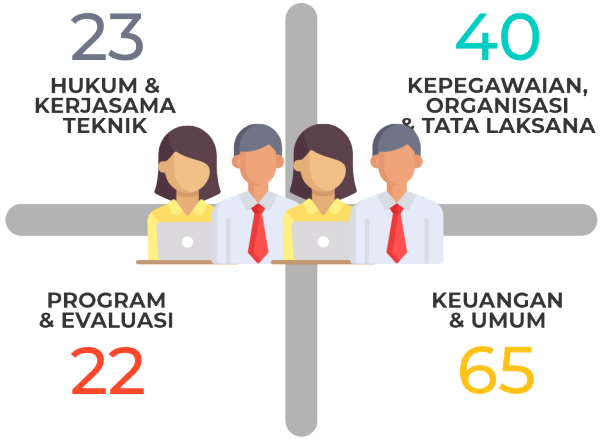

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk memenuhi tugas koordinasi dan memberikan dukungan administrasi serta fungsi koordinasi dan pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama teknis dan bantuan advokasi hukum serta pelaksanaan urusan keuangan dan umum di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang didasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk memenuhi tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE didukung oleh 160 pegawai yang tersebar pada 4 bagian dengan masing-masing bagianterdiri dari3 Subbagian.

Landscape Cagar Alam Waigeo Barat
KSDA Papua Barat

Dokumentasi:
Desiyanti Nababan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal KSDAE

2020	2021	2022	2023	2024
78,00	78,50	79,00	79,50	78,00

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

2020-2024
1

3. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2020	2021	2022	2023	2024
3	3	3	4	4

PERJANJIAN KINERJA 2020

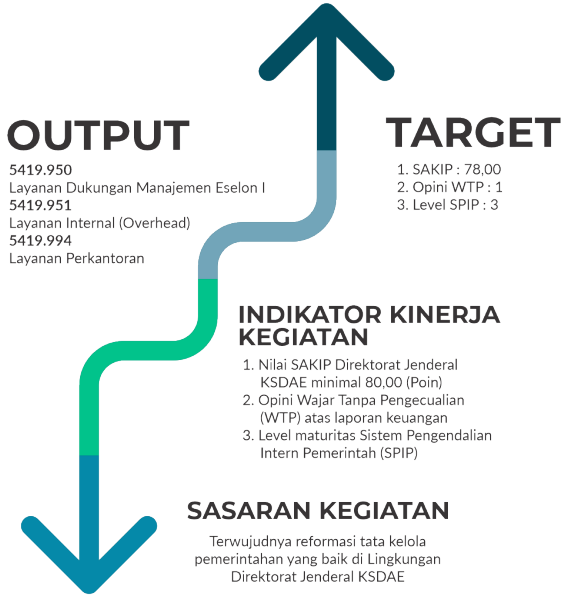

PAGU ANGGARAN 2020	Rp	80.056.000.000,-
BELANJA PEGAWAI	Rp	44.512.095.000,-
BELANJA BARANG	Rp	32.214.453.000,-
BELANJA MODAL	Rp	3.329.452.000,-

Rusa Timor di Teluk Brumbun

Dokumentasi:
Afrizal Mafna

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

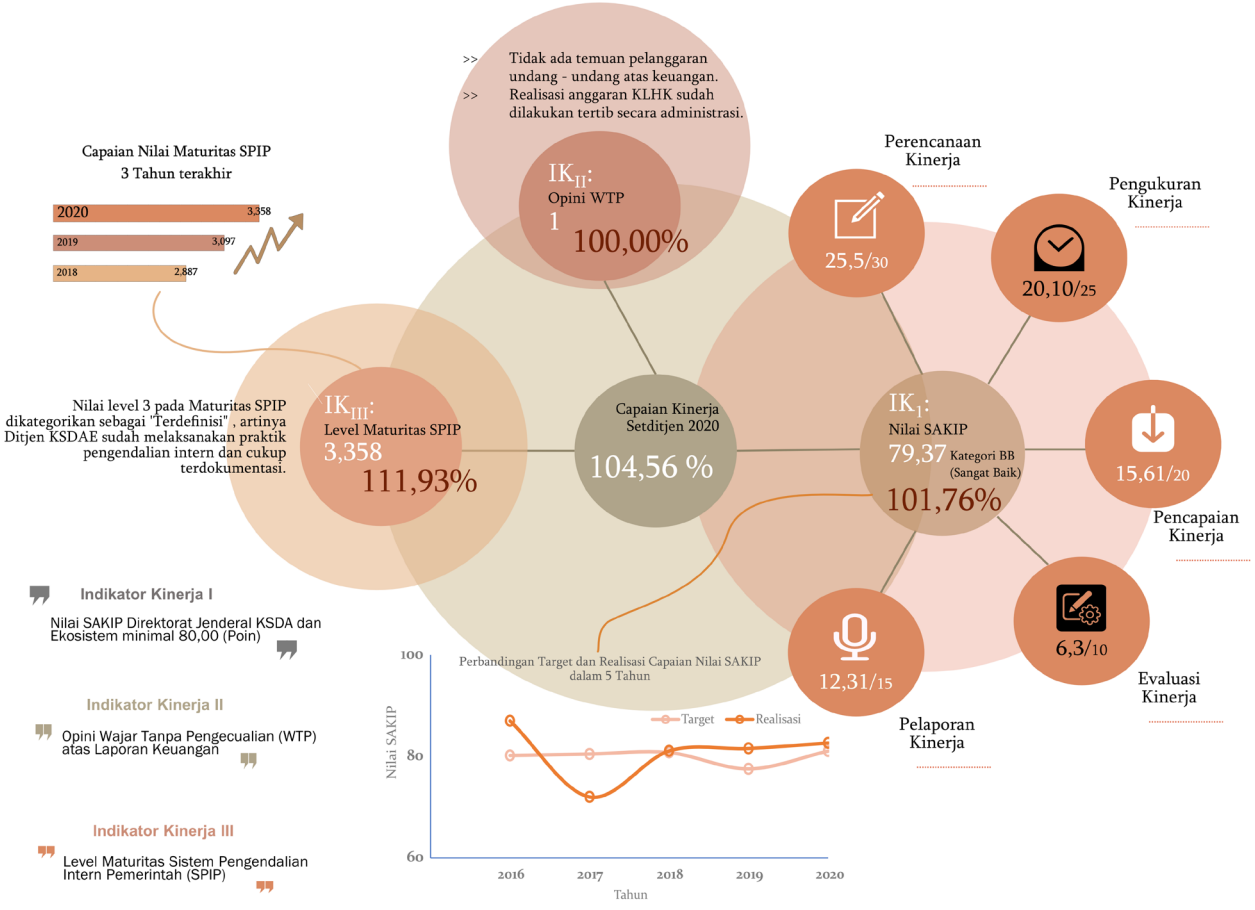

CAPAIAN KINERJA

Nilai SAKIP

Penilaian SAKIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP lingkup KLHK. Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahunnya. Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi.

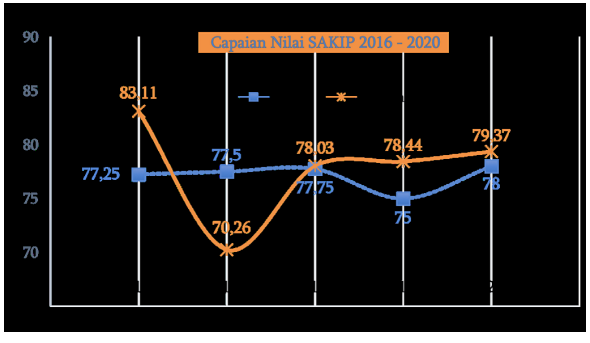

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan evaluasi atas penerapan SAKIP pada Ditjen KSDAE. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Ditjen KSDAE memperoleh nilai sebesar **79,37** dengan kategori BB (sangat baik), sebagaimana disampaikan melalui surat Plt. Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.50/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal KSDAE.

Capaian kinerja tahun 2020, SAKIP memperoleh nilai 79,37 (tercapai 101,76%) dari target 78. Hasil evaluasi SAKIP seluruh komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja yang memperoleh nilai 25,5 dari 30, Pengukuran kinerja memperoleh nilai 20,10 dari 25, Pelaporan kinerja memperoleh nilai 12,31 dari 15, Evaluasi kinerja memperoleh nilai 6,30 dari 10, dan Pencapaian kinerja memperoleh nilai 15,61 dari 20.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa kendala dalam implementasi SAKIP, antara lain:

1) Dokumen renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja,
2) Monitoring capaian renstra belum dilakukan secara periodik dan terdokumentasi,
3) Masih terdapat perbedaan target kinerja tahunan yang belum selaras dengan renstra,
4) Perjanjian kinerja masih sepenuhnya digunakan untuk penyusunan sasaran kinerja pegawai,
5) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum memadai,
6) Belum dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala kendala pelaksanaan sistem SAKIP sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi, antara lain: 1) Melakukan evaluasi kesesuaian dalam penetapan target kinerja, 2) Melakukan monitoring pencapaian target kinerja secara periodik, 3) Melakukan reviu renstra dalam penyusunan target kinerja tahunan sampai dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai, 4) Melakukan pengukuran kinerja pegawai secara berjenjang, 5) Melakukan pengumpulan data kinerja secara periodik.

Inventarisasi potensi kehati

Lokasi:
HSA Gumai Tebing Tinggi

Dokumentasi:
Taufan Kharis - BKSDA Sumatera Selatan

Opini WTP

Opini WTP diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Selama 4 tahun terakhir, KLHK telah mendapatkan predikat Opini WTP. Perolehan opini WTP dari BPK tersebut membuktikan tidak ada pelanggaran hukum atas pengelolaan keuangan dan anggaran telah direalisasikan tertib secara administrasi melalui material yang cukup dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Predikat WTP ini diperoleh atas dukungan seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE dalam menjaga ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara. Keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Ditjen KSDAE disusun mulai dari satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) sampai pada kompilasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1). Menyelesaikan rekomendasi – rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya terus dilakukan oleh Ditjen KSDAE dalam rangka mendukung tindak lanjut yang ditargetkan oleh BPK RI.

Level Maturitas SPIP

Tingkat maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan gambaran mengenai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Hasil penilaian maturitas SPIP 2020 untuk Ditjen KSDAE adalah 3,358 dari 5. Perolehan nilai tersebut mengindikasikan penyelenggaraan SPIP di lingkup Ditjen KSDAE berada di tingkat ‘Terdefinisi’, artinya Ditjen KSDAE telah melaksanakan

kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten, namun belum sepenuhnya melakukan evaluasi efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan secara berkala dan pemantauan yang berkelanjutan serta terintegrasi dalam pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Wisma Nudibranch,
Pulau Tinabo, Sulawesi Selatan

Dokumentasi:
Yusuf Ronald

PROGRAM & ANGGARAN

Program & Anggaran

Sepanjang tahun 2020, subbagian Program dan Anggaran telah melaksanakan 10 kegiatan, antara lain :

1) Penyusunan rencana strategis Ditjen dan Seditjen 2020 - 2024
2) Penyusunan rencana kerja Ditjen dan Seditjen 2020
3) Penyusunan dan Pencermatan RKAKL
4) Rapat Koordinasi Teknis Bidang (Rakornis) KSDAE
5) Percepatan Pelaksanaan Target Kinerja 2020 di bidang pembangunan destinasi prioritas, realisasi HLN dan pelaksanaan *Food Estate*
6) Penelaahan revisi anggaran Tahun 2020
7) Perjalanan Dinas Gugus Tugas Multipihak (GTM) Ditjen KSDAE ke BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Alas Purwo dan BTN Komodo
8) Penyusunan dan Monitoring Proyek Prioritas SBSN di 8 UPT

EVALUASI & PELAPORAN

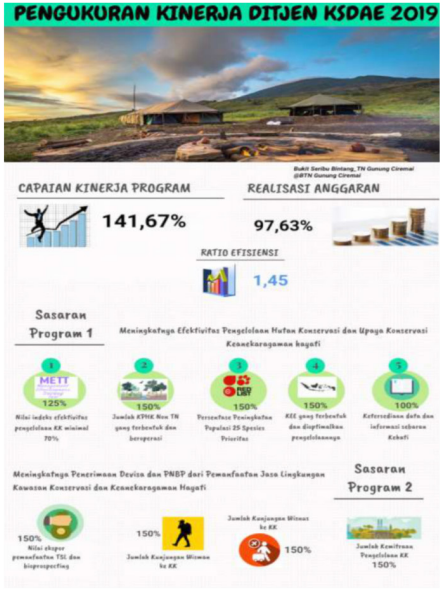

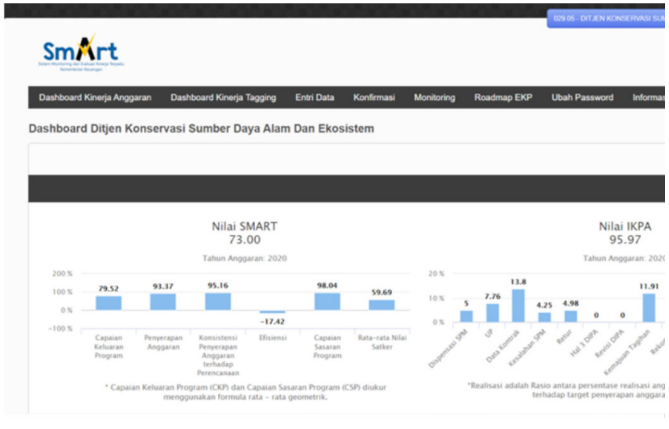

Sepanjang tahun 2020, subbagian Evaluasi dan Pengaanggaran telah melaksanakan 8 kegiatan, antara lain :

1) Penyusunan laporan kinerja Ditjen KSDAE 2019
2) Penyusunan laporan kinerja Setdiitjen KSDAE 2019
3) Pemantauan Capaian IKP dan IKK Ditjen KSDAE
4) Laporan realisasi per komponen kegiatan melalui aplikasi eMonev Bappenas
5) Laporan realisasi output melalui aplikasi SMART
6) Laporan harian realisisa output
7) Laporan tematik yang terdiri dari:
   - Laporan kegiatan Prioritas Nasional
   - Laporan kegiatan perbatasan
   - Laporan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
8) Pemantauan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen KSDAE

DATA & INFORMASI

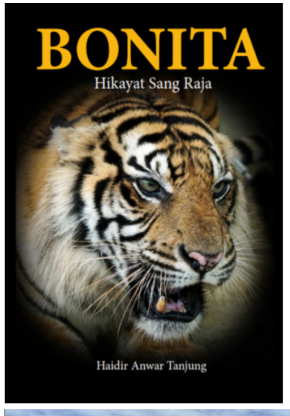

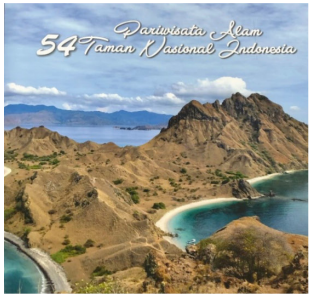

Sepanjang tahun 2020, subbagian Data dan Informasi telah melaksanakan 8 kegiatan, antara lain:

1) Penyusunan buku statistik Ditjen KSDAE 2019
2) Diseminasi Informasi KSDAE
3) Pengelolaan pendataan SIDAK KSDAE
4) Pengelolaan dan pembaharuan website KSDAE
5) Penyajian informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
6) Kerjasama Gugus Tugas Multipihak (GTM)
7) Pembangunan infrastruktur ICT (*Information and Communications Technology*) | *Operasional Sit Room &_RBM*
8) Penyusunan buku Bonita Hikayat Sang Raja

Kunjungan Lapangan Rakornis 2020

Lokasi:
Wisata Alam Jurang Jero TN Gunung Merapi

Dokumentasi:
Datin Setditjen KSDAE

CAPAIAN RENCANA KERJA
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Penyusunan & Tindak Lanjut Formasi Lingkup Ditjen KSDAE

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat 203 formasi dari 705 formasi lingkup KLHK. Berdasarkan hasil dari tahapan seleksi yang telah dilaksanakan, 190 formasi yang dinyatakan lolos sedangkan 13 formasi dinyatakan tidak lolos karena gagal seleksi kompetensi dan mengundurkan diri

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

- **Penyusunan Data SIMPEG** Pada tahun 2020, telah dilaksanakan penyusunan data SIMPEG di BKSDA Jakarta, BKSDA Yogyakarta, BBKSDA Jawa Timur, BBTN Gunung Gede pangrangop, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN komodo dan BKSDA Jawa TEngah. Penyusunan data dilakukan dengan memperbaharui data pegawai secara kontinyu pada aplikasi SIMPEG dan Sisem Aplikasi pelayanan Kepegawaian (SAPK)
- **Sertijab Pejabat Struktural** Pada tahun 2020 telah dilakukan mutasi jabatan dan dilakukan serah terima jabatan pejabat struktural sebanyak 19 jabatan yang terdiri dai 18 jabatan administrator (eselon III) dan 1 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)
- **Proses Pelayanan Pensiun PNS** Selama tahun 2020 telah diproses 330 usulan pensiun lingkup Ditjen KSDAE Pusat dan UPT. Sesuai Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor S.511/Ropeg/MK/peg.5/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Proses Pelayanan Pensiun PNS secara Elektronik dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pensiun lingkup Kementerian LHK dipandang perlu melakukan perubahan proses pengusulan Pensiun secara elektronik

Pengelolaan Kenaikan Pangkat Reguler dan Struktural

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun dan unutk periode April tahun 2020 telah diproses sejumlah 176 usulan. Pada periode Oktober 2020 telah diproses sejumlah 109 usulan.

Penyelesaian Kasus Pegawai

Periode tahun Januari 2020 sampai Desember 2020 kasus disiplin yangg tetlah diproses sebagai berikut:

1. Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal KLHK: 3 kasus yang masih dalam proses
2. Pelanggaran disiplin PNS terdapat 28 kasus, dengan rincian 11 kasus telah selesai, 4 kasus dalam proses Biro Kepegawaian, 4 kasus dan 11 kasus masih dalam proses Sekretariat Ditjen KSDAE
3. Proses izin perceraian terdapat 20 kasus, dengan rincian 11 kasus perceraian telah selesai, 4 kasus masih dalam proses pada Biro Kepegawaian dan 5 kasus dalam proses UPT
4. Pengaduan masyarakat terdapat 6 kasus, dengan rincian 2 kasus masih dalam proses pada Biro Kepegawaian dan 4 kasus dalam proses UPT (ada kekurangan berkas yang harus dilengkapi)

Penilaian DUPAK

Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) akan menghasilkan HAPAK dan PAK yang tertuan dalam BAP penilaian. Pada tahun 2020, pejabat fungsionla Polhut dan PEH memperoleh 414 HAPAK dan 619 PAK. Sosialosasi dan penilaian DUPAK dilakukan secara langsung di UPT, antara lain: BTN Kepulauan Seribu; BKSDA Bail; BKSDA Kalimantan Timur; BTN Bali Barat; BKSDA Yogyakarta; BKSDA Bengkulu; BTN Alas Purwo; BTN Baluran; BKSDA Nusa Tenggara Barat; BBTN Bulit Barisan Selatan; BKSDA Kalimantan Tengah; BTN Gunung Merbabu

Pengembangan Karir Pegawai

Pada tahun 2020 terdapat PNS mengikuti Tugas Belajar Program Doktor (S3) sebanyak 1 orang, Magister (S2) sebanyak 10 orang, yang perpanjangan tugas belajar sebanyak 10 orang (berasal dari: KLHK (Pusdiklat LHK), Bapenas dan sponsor lainnya. Tahun 2020, terdapat 4 orang yang dicabut tugas belajarnya, yaitu program S3 sebanyak 2 orang dan Magister S2 sebanyak 2 orang. Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan program S1 dengan biaya mandiri pada tahun 2020 sebanyak 73 orang, untuk program S2 sebanyak 48 orang dan S3 sebanyak 4 orang.

Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Test 4 Kriteria sebanyak 48 peserta dengan hasil lulus sebanyak 44 orang. Kegiatan Ujian Dinas diikuti oleh peserta sebanyak 185 orang peserta dengan hasil 34 lulus. Yahun 2020 usulan calon peserta ujian GI/GI/PG dari Ditjen KSDAE sebanyak 21 orang.

Kegiatan Uji Kompetensi bagi jabatan fungsional pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Kehutanan tahun 2020 dilaksanakan oleh BP2SDM dengan usulan Polhut sebanyak 131 orang peserta, PEH sebanyak 1367 orang peserta dan 12 orang Penyuluh Kehutanan.

Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE

Pada tahun 2020, Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional telah melaksanakan kegiatan pembinaan jabatan fungsional ke beberapa lokasi diantaranya BKSDA Bengkulu, BBKSDA Papua, BTN Ujung Kulon, BTN Gunung halimun Salak, BBTN Gunung Gede Pangrango, BKSDA Yogyakarta, BTN Way Kambas, BKSDA Kalimantan tengah, BKSDA Aceh

Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional

Pada tahun 2020, pemberkasan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional PEH, Polhut, Penyuluh dan fungsinal lainnya sebanyak 627 berkas kenaikan pangkat dan 113 berkas kenaikan jabatan

Penilaian PEH Berprestasi

Peserta kegiatan ini adalah Pejabat Fungsional PEH dari perwakilan beberapa UPT yang lolos seleksi administratif dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan. Penghargaan untuk pemenang PEH Berprestasi tahun 2020 dilakukan di Bontang, Kalimantan Timur dalam rangkaian acara HKAN

PENGEMBANGAN ADMINISTRASI & KETATALAKSANAAN

Review Struktur, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Organisasi

Penyesuaian organisasi dilakukan melalui penelaahan bahan, penyusunan dan pembahasan dengan capaian sebagai berikut :

1. Matrik Penyetaraan Jabatan RancangaPeraturanPresiden tentang Kementerian LHK lingkup Ditjen KSDAE
2. Usulan revisi Peraturan MENLHK nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari :
   - Struktur organisasi setiap Direktorat Teknis lingkup Ditjen KSDAE;
   - Rancangan Peraturan MENLHK lingkup Ditjen KSDAE sebagai pengganti Peraturan MENLHK nomor P.18/MENLHK-II/2015;
   - Matrik tugas dan fungsi lingkupDitjen KSDAE.
3. Usulan pemindahan lokasi kantor BBTNGL melalui surat Menteri LHK kepada Menteri PANRB dan telah disetujui.

Review Informasi Jabatan

Capaian dari kegiatan review informasi jabatan (Pelaksana, Pengawas, Administrator, dan JPT) dalam rangka analisis jabatan lingkup Ditjen KSDAE yaitu:
Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET.3/OTL.1/6/2020 tentang Standar dan Uraian Analisis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana pada Direktorat Teknis Lingkup Ditjen KSDAE dengan lampiran sebanyak 5 buku;

Informasi jabatan fungsional usulan formasi inpassing Ditjen KSDAE sebanyak 121 informasi jabatan fungsional yang terdiri dari 12 jenis jabatan fungsional di 42 Satker lingkup Ditjen KSDAE

Hasil review pedoman standar dan uraian analisis jabatan UPT lingkup Ditjen KSDAE

Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat diimplementasikan sebanyak 63 nomenklatur jabatan

Penyusunan SOP, Proses Bisnis dan Tata Hubungan Kerja

Penyusunan Proses Bisnis
Capaian dari kegiatan ini adalah dokumen draf Peta Proses Bisnis sebanyak 82 peta proses bisnis dengan rincian Level 1, 1 dokumen; Level 2, 5 dokumen; Level 3, 16 dokumen; Level 4, 60 dokumen.

Penyusunan SOP
Capaian yang dihasilkan adalah tersusunnya PetunjukTeknis Penyusunan SOP AP Lingkup Ditjen KSDAE

Fasilitasi pembentukan UPT
Penunjukan BBKSDA Riau, BBKSDA Sulawesi Selatan, dan BKSDA Sumatera Selatan sebagai Unit Pelaksana dan Pembina Teknis Organisasi terhadap pengelolaan TN Zamrud, TN Gunung Maras dan TN Gandang Dewata

Reviu penilaian evaluasi kinerja organisasi

1. Sosialisasi kebijakanreformasi birokrasi dilaksanakan pada 9 UPT
2. Implementasi Zona Integritas (ZI) dilaksanakan di 3 UPT.
3. 4 UPT yang didukung untuk membangun ZI

Santuary Kupu-kupuTN Bantimurung Bulusaraung

Dokumentasi:
BTN Bantimurung Bulusaraung

CAPAIAN RENCANA KERJA
HUKUM & KERJASAMA TEKNIK

KERJASAMA & KEMITRAAN

Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama

Sepanjang tahun 2020, terdapat 4 proposal proyek multilateral, 5 perjanjian kerja sama bilateral, dan 5 rencana pengembangan kerja sama baru yang telah mencapai proses analisis, pembahasan dan pelajaran kepada Direktur Jenderal KSDAE dan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan. Output yang telah dihasilkan dan kegiatan ini berupa draft Perjanjian Kerja Sarna (PKS) dan proposal proyek hibah untuk:

1. Penelaahan Perjanjian Kerja Sama di Balai Taman Nasional Ujung Kulon.
2. Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerja Sarna di Balai Besar Konservasi Sumher Daya Alam Jawa Barat

Pemantauan & Evaluasi Kerjasama

Pada tahun 2020 terdapat 58 perjanjian kerja sama yang telah berakhir dan akan diperpanjang setelah proses evaluasi. Selain itu, terdapat satu mitra yang mengundurkan diri yaitu Zoological Society of London (ZSL) sehingga memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengakhiri kerja sama. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan tahun2020 adalah sebagai berikut:

- Pemantauan KerjaSama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dengan PT Pertamina Geothermal Energy (Pusat Konservasi Elang Jawa)
- Pemantauan Kerja Sama dengan Frankfrut Zoological Society di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi

Koordinasi Kerjasama Kemitraan

Berdasarkan hasil penghimpunan data kerjasama dalam negeri dari seluruh UPT yaitu terdapat 724 kerjasama yang masih aktif, 48 kerjasama dalam proses perpanjangan, dan 122 kerjasama yang telah berakhir. Kerjasama tersebut terdiri dari 647 kerjasama penguatan fungsi, dan 125 kerjasama pembangunan

Koordinasi Kerjasama Kemitraan

Pada tahun 2020 telah difasilitasi 4 kerjasama di tingkat pusat dan 3 di tingkat UPT. Output kegiatan ini adalah pembahasan Perjanjian kerjasama pasca pengakhiran kerja sama WWF, asistensi kepatuhan pelaksanaan kerja sama dengan ormas asing, fasilitasi pembahasan akhir proyek hibah luar negeri dengan Amerika Serikat serta pembahasan perjanjian kerja sama dalam negeri

Fasilitasi Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri dan/atau Peraturan/Keputusan Dirjen KSDAE

1. Undang-Undang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri :
   - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 Tahun 2003 tentang
   - Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran
   - Tumbuhan dan Satwa Liar
   - Penyelamatan Satwa Liar
   - Draft Revisi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penangkaran
   - Tumbuhan dan Satwa Liar
   - Draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata
   - Usaha Penangkapan atau Pengambilan dan Peredaran TSL
   - Draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Kegiatan Penataan Blok Pengelolaan Taman Buru

3. Peraturan Dirjen
Petunjuk Teknis Inventarisasi Sumber Daya Alam di Suaka Margasatwa, TN, Tahura dan TWA serta Hutan Lindung
Pedoman Penyusunan Proposal Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
Petunjuk Teknis Pemulihan Ekosistem Mangrove pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru
Pemberdayaan Masyarakat

Penyusunan dan Revisi Peraturan pemerintah

Peraturan Pemerintah yang masih dalam proses di Direktorat Jenderal KSDAE, antara lain:

1. Tindak Lanjut Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tentangPerlindungan Sistem Penyangga Kehidupan
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan di bidang KSDAE kepada ASN Lingkup KLHK khususnya Direktorat Jenderal KSDAE.

PERTIMBANGAN & ADVOKASI HUKUM

Penanganan Perkara Perdata & Tata Usaha Negara (TUN)

No	No Register Perkara	Obyek Gugatan	Status	Keterangan
1	No. 35 /PDT.G/2017/PN.LBJ tanggal 13 September 2017	Klaim kepemilikan tanah seluas ± 33.359 m^2 di kawasan TN Komodo, Labuan Bajo, NTT	PK	PN Labuan Bajo: Menang PT Kupang: Kalah MA: Kalah PK: Proses
2	No. 44 /Pdt.G/2019/PN.Dum tanggal 14 November 2019	Gugatan Legal Standing (kerusakan lingkungan hidup)	Banding	PN Dumai: Menang PT Pekanbaru: Proses
3	No. 275 /PDT.G/2019/PN.Bit tanggal 16 Desember 2019	Klaim kepemilikan tanah seluas 1.776 Ha di dalam kawasan TWA Batu Putih dan Cagar Alam Duasudara	Banding	PN Bitung: Menang PT Manado: Proses

Asistensi Penyelesaian Kasus Bidang KSDAE

Sasaran kegiatan asistensi penyelesaian kasus-kasus bidang KSDAE ini adalah untuk membantu penyelesaian kasus dan perkara yang dihadapi UPT Direktorat Jenderal KSDAE, adapun lokasinya pada BBKSDA Riau, BBTN Bukit Barisan Selatan, BTN Karimunjawa.

Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Pada tahun 2020, telah dilakukan fasilitasi dan koordinasi pertimbangan dan advokasi hukum pada 9 UPT, yaitu BKSDA DI Yogyakarta, BTN Way Kambas, BTN Gunung Halimun Salak, BBKSDA Riau, BKSDA Bengkulu (Seksi III Lampung), BBKSDAJawa Timur, BKSDAJawa Tengah, BTN Ujung Kulon, dan BBKSDA Jawa Barat.

Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE di 6 lokasi, yaitu BTN Kepulauan Seribu, BBKSDA Jawa Barat, BTN Alas Purwo, BTN Gunung Halimun Salak, BBTN Gunung Gede Pangrango, dan BTN Gunung Ciremai.

Dokumentasi:
Endro Setiawan
Photo By Endro Setiawan

CAPAIAN RENCANA KERJA KEUANGAN & UMUM

ADMINISTRASI KEUANGAN

Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2019

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi, rekonsiliasi dan evaluasi data satuan kerja sebelum dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan tingkat Eselon I. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1) Masih terdapat pagu minus pada satker lingkup
2) Ketidaksesuaian akun belanja modal dan fisik barang
3) Terdapat selisih rekon spm terkait belanja modal (53)
4) Terdapat pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi yang masih menggunakan belanja modal (53)
5) Terdapat pengembalian melebihi realisasi
6) Terdapat satker yang masih menggunakan akun pendapatan lama
7) Keterbatasan SDM akuntansi pada Satuan Kerja
8) Anggaran dan waktu yang terbatas pada saat penyelenggaraan Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan lingkup Ditjen KSDAE

Monitoring Tindak Lanjut LHA BPK RI, BPKP dan Itjen lingkup Ditjen KSDAE

1 . Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal KLHK
   - Data Awal terdapat temuan 9162 temuan dan 19.159 rekomendasi dengan nilai kerugian sebesar Rp 12.752.359.661.42
   - Telah ditindaklanjuti sebanyak 8.676 temuan dan 18.099 rekomendasi dengan total kerugian negara sebesar Rp 9.143.587.035.05
   - Sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 486 temuan dan 487 rekomendasi dengan total kerugian negara sebesar Rp 3.608.772
2. Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal KLHK
   - Data awal temuan terdapat 930 rekomendasi dengan total kerugian negara sebesar Rp 70.507.272.163
   - Telah ditindaklanjuti sebanyak 426 rekomendasi dengan total kerugian negara sebesar Rp 43.737.538.762
   - Sisa yang belum ditindaklanjuti sebanyak 506 temuan, 884 rekomendasi total kerugian negara sebesar Rp 26.849.733.401
3. Laporan Hasil Audit BPK RI

   Data Awal terdapat temuan sebanyak 129 temuan dan 197 rekomendasi dengan total kerugian negara sebesar Rp 64.977.899.665,51 yang harus diselesaikan oleh Satker Direktorat Jenderal KSDAE. 104 temuan yang bersifat Kerugian Negara dan 85 rekomendasi yang bersifat administrasi telah ditindaklanjuti.

Penyusunan laporan Keuangan Setditjen KSDAE Tahun 2019

Pembinaan Keuangan Pelaksana Anggaran Satker dan Pengelolaan PNBP Bidang KSDAE

Monitoring Tindak Lanjut Kerugian Negara dan Evaluasi Penatausahaan Hibah Ditjen KSDAE

Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I 2020

Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE TA. 2019 (Audited)

Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2020

Asistensi Tata Kearsipan Lingkup Ditjen KSDAE di UPT

Pada tahun 2020, kegiatan ini dilaksanakan di 14 UPT yaitu BKSDA Sumatera Barat, BTN Gunung Ciremai, BTN Ujung Kulon, BBKSDA Jawa Barat, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Bali, BTN Gunung Merbabu, BTN Gunung Palung, BKSDA Yogyakarta, BBKSDA Jawa Timur, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Karimunjawa, BTN Alas Purwo, dan BBTN Bromo Tengger Semeru.

Penatausahaan Persuratan dan Arsip

Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan primer dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian tata usaha seperti pencetakan kop naskah dinas, pembuatan amplop dinas, lembar disposisi dan blanko kendali SIK termasuk pembelian alat tulis kantor dan bahan pelaporan untuk penggandaan naskah dinas dan proses distribusi naskah dinas.

Asistensi Tata Persuratan Kementerian LHK

Pada tahun 2020, kegiatan 1n1 dilaksanakan pada 13 UPT yaitu BTN Baluran, BTN Bali Barat, BTN Gunung Merapi, BTN Ujung Kulon, BBKSDA Riau, BBKSDA Jawa Barat, BTN Gunung Ciremai, BTN Tambora,BBTN Gunung Gede Pangrango, BBTN Bromo Tengger Semeru, BBKSDA Jawa Timur, BTN Kepulauan Seribu, BKSDA Jawa Tengah.

Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen KSDAE

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tertatanya seluruh arsip inaktif Ditjen KSDAE. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah terpilahnya arsip sesuai dengan bagian yang menangani substansi arsip dimaksud, selain itu juga menghasilkan database arsip dalam bentuk softcopy untuk seluruh arsip serta laporan pelaksanaan kegiatan berupa daftar arsip inaktif yang disimpan di Unit Pusat Kearsipan 1/11, berlokasi di Kantor KSDAE Jl. H. Ir. Juanda No. 15 Bogor.

Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2019

Kegiatan ini untuk mengolah data dan informasi terkumpul dalam pelaksanaan Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi BMN Ditjen KSDAE Tahun 2019 sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan BMN dan bahan penyusunan neraca pemerintah pusat.

1. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporana ini, diantaranya adalah: Lambatnya pengumpulan hasil perbaikan/ koreksi revaluasi BMN dan keterbatasan informasi terkait cara-cara memasukkan nilai hasil perbaikan/ koreksi tersebut, sehingga data-data hasil perbaikan/ koreksi revaluasi disajikan dalam laporan *unaudited* terkesan seadanya, dan menjadi hambatan audit oleh BP.
2. Satker tidak menjelaskan penyebab terjadinya ketidaksesuaian akun belanja dan alasan/ pertimbangan tidak melakukan revisi atas ketidaksesuaian tersebut, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan.
3. Satker tidak segera menindaklanjuti saldo minus (nilai buku dan nilai perolehan).
4. Satker tidak menjelaskan traksaksi reklarifikasi dan koreksi yang dilakukan, sehingga kesulitan melacaknya apabila terjadi kesalahan.
5. Satker belum menyajikan data terkait pengelolaan BMN yang terkini.

Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2020

Pengumpulan data penyusun laporan BMN tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi COVID-19 dan penghematan anggaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim penyusun, karena data dan informasi yang diinginkan hanya dikirim melalui surat elektronik dan komunikasi via telepon, sehingga dalam pelaksanaan analisa data dan informasi tidak dapat terlaksana secara optimal

Konsolidasi & Telaah Data Transaksi Barang Milik Negara Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2020

Kegiatan dilaksanakan pada 22-24 Januari 2020 dihadiri perwakilan UAKPB lingkup Ditjen KSDAE dengan mendatangkan narasumber dari Direktorat BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan adalah:

1. Perbaikan/koreksi atas hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (Revaluasi) Tahun 2017 - 2018.
2. Ketidaksesuaian penggunaan akun belanja yang dapat menyebabkan timbufnya akun aset belum diregister pada neraca yang tidak bisa tereliminasi secara otomatis
3. Penyesuaian Menu Normalisasi
4. Kesalahan Dalam Melakukan Reklasifikasi dan Koreksi

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dilaksanakan secara mandiri oleh satker, sesuai dengan arahan Sekretaris Ditjen KSDAE. Rincian usulan RKBMN untuk pengadaan sebanyak 71 unit dan RKBMN untuk pemeliharaan sebanyak 1 0.705 unit, namun berdasarkan hasil rapat dalam forum penelaahan RKBMN antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK dan APIP yang diselenggarakan pada tanggal 19 - 20 Oktober 2020, usulan RKBMN pengadaan yang disetujui hanya sebanyak 66 unit dan RKBMN pemeliharaan sebanyak 10.691 unit.

Penanganan Kasus & Permasalahan BMN

Beberapa temuan BPK atas LaporanKeuangan Tahun 2019 diantaranya:

1. Pencatatan persediaan tidak tertib, meliputi selisih catatan persediaan dengan hasil opname fisik
2. BMN yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan revaluasi yang masih tersaji dalam neraca
3. Aset tetap dan aset tak berwujud yang tidak dapat ditelusuri secara pasti keberadaannya
4. Aset tetap tidak didukung dokumen kepemilikan.
5. Aset rusak berat yang belurn di reklasifikasi ke aset lainnya
6. Proses administrasi barang yang diserahkan kepada masyarakat yang belum diselesaikan, sehingga masih tercatat di neraca

Pengelolaan Perpustakaan Ditjen KSDAE

Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai perpustakaan yang berada di Jl Juanda 15 Bogar. Perpustakan Ditjen KSDAE memiliki 502 buku yang terdiri dari berbagai macam tema dan judul. Selain koleksi buku-buku, di perpustakaan Ditjen KSDAE banyak terdapat skripsi, tesis, disertasi, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen peraturan peninggalan Hindia Belanda. Mengingat banyaknya koleksi buku dan dokumen yang memiliki nilai historis tinggi, maka kegiatan pengelolaan perpustakaan dititikberatkan pada pengawetan bahan pustaka dengan tujuan untuk melindungi bahan pustaka dari sebab sebab yang mengakibatkan kerusakan dengan cara pemeliharaan kondisi lingkungan bahan pustaka dan pemeliharaan kondisi fisik bahan pustaka.

Penertiban dan Pengurusan Buku Pas Senjata Api dan Amunisi

Ditjen KSDAE memiliki 1.498 pucuk senjata api yang terdiri dari senjata laras panjang, senjata laras pendek dan senjata bius, yang tersebar di 67 UPT di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan amunisi senjata api tersebut, Sekretariat Ditjen KSDAE mendistribusikan sejumlah amunisi ke UPT di daerah. SepanjangTahun 2020, telah terdistribusi sebanyak 1.750 butir amunisi dengan rincian BBKSDA Riau sebanyak 450 butir, BTN Gunung Palung sebanyak 500 butir dan BTN Kelimutu sebanyak 800 butir.

Saat ini terdapat 2.958 butir amunisi, dengan rincian 270 butir amunisi senjata laras panjang dan 2.688 butir amunisi senjata laras pendek. Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Ditjen KSDAE telah bersurat ke Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar dapat merelokasi sebagian amunisi.

Pembinaan dan Penyegaran Satpam

Dalam melaksanakan tugasnya satuan pengamanan (Satpam) mengemban fungsi kepolisian terbatas, yaitu terbatas dalam lingkungan kerjanya, sehingga perlu arahan dan bimbingan langsung dari pihak kepolisian. Sejak 2019, Sekretariat Ditjen KSDAE merekrut 1 orang personil kepolisian sebagai pembina satpam, dengan tujuan agar dapat memberikan pembinaan secara berkesinambungan dan sebagai sarana memotivasi untuk meningkatkan kepedulian, kepekaan dan rasa percaya diri anggota Satpam. Selain adanya pembinaan satpam, tahun 2020 kembali dilakukan penyegaran Satpam yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kinerja anggota satpam di lapangan, baik dalam melaksanakan tugas pengamanan maupun pelayanan terhadap tamu, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota.

Penyelenggaraan Penghapusan/Pemindahtanganan BMN

Adanya penyederhanaan DIPA Tahun Anggaran 2020 dan perubahan kode satuan kerja di pusat, menyebabkan likuidasi suatu entitas akuntansi pada tahun 2020. Adanya proses likuidasi satker 1n1 menyebabkan perubahan perubahan data didalam aplikasi dan memerlukan beberapa penyesuaian penyesuaian secara administrasi, sehingga proses penghapusan/pemindahtanganan belum bisa dilaksanakan

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN

Evaluasi terhadap hasil monitoring pengelolaan BMN :

1. Belum diusulkannya penetapan status penggunaan BMN kepada pengelola barang maupun pengguna barang
2. Pemanfaatan BMN belum mendapatkan persetujuan dariPengelola Barang
3. Jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan melampaui waktu yang diatur dalam surat keputusan pemanfaatan atau perjanjian kontrak
4. Lambatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan-temuan

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Sekretariat Ditjen KSDAE pada tahun 2020 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 80.056.000.000, yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 79.634.860.000,- (99,47%) dan PNBP sebesar Rp. 421.140.000,- (0,53%). Sampai akhir 2020, realisasi RM sebesar Rp. 72.939.666.057,- (91,59%) dan PNBP sebesar Rp. 416.482.639,- (98,89%). Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar Rp. 73.356.148.696,- atau 91,63%. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,17%. Realisasi tidak dapat maksimal dikarenakan serapan belanja pegawai pada kantor pusat Ditjen KSDAE akibat dari tidak dibayarkannya tunjangan kinerja 13 dan 14.

Perbandingan Realisasi dengan Pagu Periode 5 Tahun

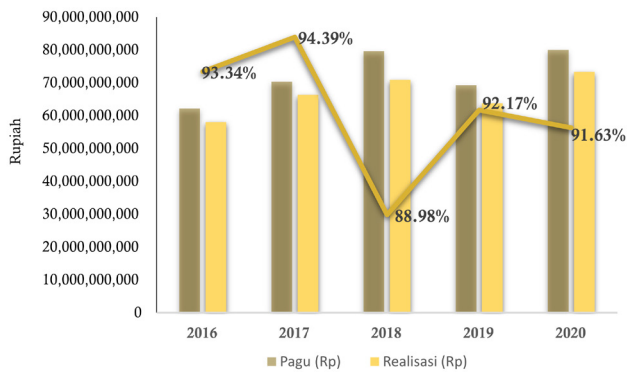

Sumber: OMSPAN, 12 Januari 2021

Tabel Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	44.512.095.000	39.911.994.645	89,67%
2	Belanja Barang	32.214.453.000	30.162.014.097	93,63%
3	Belanja Modal	3.329.452.000	3.257.034.500	97,82%
	TOTAL	**80.056.000.000**	**73.356.148.696,00**	**91,63%**

Sumber: OMSPAN, 12 Januari 2021

Tabel Pagu dan Realisasi berdasarkan Output

Kode	Output	Pagu	Realisasi	%
5419.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	16.317.285.000	15.695.191.150	96,19%
5419.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.069.662.000	2.997.815.500	97,66%
5419.994	Layanan Perkantoran	60.669.053.000	54.663.142.046	90,10%
	Jumlah	**80.056.000.000**	**73.356.148.696**	91,63%

Sumber: OMSPAN, 12 Januari 2021

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE tahun 2020 dari 3 IKK yaitu sebesar 104,56%. Dari capaian kinerja tersebut dapat dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen KSDAE adalah sebesar 91,63% dan capaian kinerja sebesar 104,56%, didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,87 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada Sekretariat Ditjen KSDAE efisien terhadap capaian kinerja.

Pulau Batu

Lokasi:
TN Karimunjawa

Dokumentasi:
Nur Burhanudin

BAB IV
PENUTUP

Pada tahun 2020, Sekretariat Ditjen KSDAE, melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya Ditjen KSDAE, melaksanakan 3 indikator kinerja kegiatan, yaitu Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, Opini WTP atas Laporan Keuangan dan Level Maturitas SPIP. Ketiga IKK telah tercapai sesuai target, yaitu SAKIP memperoleh nilai 79,37 atau 101,76% dari target 78, opini atas laporan keuangan telah mendapatkan opini WTP (tercapai 100%), dan maturitas SPIP mendapatkan level 3,358 (111,93%), sehingga rata-rata capaian kinerja Sekretariat DItjen KSDAE tahun 2020 adalah sebesar 104,56%.

Pelaksanaan ketiga indikator tersebut dituangkan pada 3 output kegiatan yaitu layanan dukungan manajemen Eselon I, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran. Layanan dukungan manajemen Eselon I pada Sekretariat Ditjen KSDAE, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, data dan informasi, administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, kerjasama kemitraan, peraturan perundangan-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum, administrasi keuangan, ketatausahaan umum, dan administrasi perlengkapan. Layanan sarana dan prasarana internal dilaksanakan melalui pengadaan kendaraan bermotor dan perangkat pengolah data dan komunikasi. Sedangkan layanan perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan pembayaran gaji, tunjangan dan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran Kantor Pusat Ditjen KSDAE.

Pelaksanaan kegiatan ini telah didukung dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 80.056.000.000, dan telah direalisasikan sejumlah Rp73.356.148.696,- atau 91,63%. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja, didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,87 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 termasuk kategori efisien, sehingga penggunaan anggaran pada Sekretariat Ditjen KSDAE efisien terhadap capaian kinerja.

Dengan tercapainya ketiga indikator kinerja kegiatan tersebut, kegiatan Dukungan Manajemen pada Sekretariat Ditjen KSDAE dapat dikatakan telah dapat mendukung terwujudnya sasaran reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen KSDAE.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Tandya Tjahjana, M.Si
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Ir. Tandya Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1	Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin) 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (Opini WTP) 3. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level SPIP)	5419.950 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 5419.951 - Layanan Internal (Overhead) 5419.994 - Layanan Perkantoran	1. 78 Poin 2. Opini WTP : 1 3. Level SPIP : 3

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Anggaran :

Rp 80.056.800.000,-

Jakarta, Desember 2020

Direktur Jenderal,

Ir. Wiratno, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Ir. Tandya Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	Tahapan: Persiapan data dukung penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	Tahapan: 1.Persiapan data dukung penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 2.Penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE oleh Tim Inspektorat Jenderal	78 Poin	78 Poin
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2019 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2019	Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2020 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setditjen KSDAE Semester I 2020 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	Tahapan: 1.Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2020 2.Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setditjen KSDAE Triwulan III 2020 3.Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	Opini WTP : 1 Tahapan: 1.Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2020 2.Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2020 3.Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE
		Level Maturitas Sistem Pengendalian	Tahapan : 1.Penyusunan Desain SPIP yang sudah	Tahapan : 1.Pemantauan kebijakan pengendalian	Tahapan : 1.Pemantauan kebijakan pengendalia	Level SPIP : 3 Tahapan : 1.Pemantauan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
		Intern Pemerintah (SPIP)	direviu oleh Itjen 2. Penyusunan Laporan pemantauan dan evaluasi triwulan 1 pada aplikasi SPIP online	pada risiko signifikan pada Triwulan II 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan II	n pada risiko signifikan pada triwulan III 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan III 3. Persiapan data dukung penilaian maturitas SPIP Ditjen KSDAE	kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada triwulan IV 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan IV serta laporan penyelenggaraan SPIP tahun 2020 untuk meningkatnya level maturitas SPIP Ditjen KSDAE Tahun 2020 3. Penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2020 Ditjen KSDAE oleh Tim Inspektorat Jenderal KLHK

Jakarta, Desember 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Ir. Tandya Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002